



## Perkembangan Politik dan Dinamika Institusional di Indonesia dan Filipina: Analisis Politik Komparatif

**Muhammad Pasha Fathurilham**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email : [mpashafathurilham01@gmail.com](mailto:mpashafathurilham01@gmail.com)

### Abstract

This study analyzes the political development and institutional dynamics of Indonesia and the Philippines through a comparative politics approach. The research focuses on six main aspects, namely historical background, political system, governmental system, party system, socio-cultural characteristics, and socio-economic conditions. The study employs a qualitative comparative method based on literature review using academic books, journal articles, and reports from international institutions. The analytical framework is grounded in the theories of political development by Huntington (1968), comparative politics by Almond and Powell (1966), political culture by Almond (1960), and institutionalism by North (1990). The findings indicate that Indonesia and the Philippines share several similarities as democratic presidential states in Southeast Asia that experienced colonialism and democratic transition. However, significant differences exist in political institutionalization, party system development, governance effectiveness, and political culture. Indonesia demonstrates stronger democratic consolidation and party institutionalization following the Reformasi era, while the Philippines continues to experience the dominance of political dynasties and patron-client relations. In socio-economic terms, both countries have achieved steady economic growth, yet challenges such as inequality, poverty, and governance quality remain evident. The study concludes that institutional capacity, political culture, and governance effectiveness are decisive

**Keywords:** Comparative Politics, Indonesia, Philippines, Political Development, Democracy.

### INTRODUCTION

Politik komparatif merupakan salah satu cabang ilmu politik yang bertujuan untuk memahami persamaan dan perbedaan sistem politik antarnegara melalui analisis terhadap institusi, budaya politik, proses politik, dan kondisi sosial ekonomi yang melatarbelakanginya. Menurut Almond dan Powell (1966), studi politik komparatif tidak hanya berfokus pada struktur formal pemerintahan, tetapi juga pada fungsi-fungsi politik yang dijalankan oleh berbagai institusi dalam suatu sistem politik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana negara-negara dengan karakteristik yang berbeda mengelola kekuasaan, menjaga stabilitas politik, dan mencapai tujuan pembangunan nasional.

Indonesia dan Filipina merupakan dua negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara yang memiliki sejumlah kesamaan historis dan institusional. Kedua negara pernah mengalami kolonialisme dalam jangka waktu yang panjang, memperoleh kemerdekaan pada abad ke-20, serta mengadopsi sistem pemerintahan presidensial sebagai dasar penyelenggaraan negara.

Selain itu, Indonesia dan Filipina juga telah mengalami proses demokratisasi setelah berakhirnya rezim otoriter yang pernah mendominasi kehidupan politik masing-masing negara. Indonesia memasuki era Reformasi setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, sedangkan Filipina mengalami transisi demokrasi setelah berakhirnya pemerintahan Ferdinand Marcos melalui Revolusi People Power tahun 1986.

Meskipun memiliki sejumlah kesamaan, perkembangan politik kedua negara menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Indonesia mengalami proses konsolidasi demokrasi yang relatif stabil dengan penyelenggaraan pemilu yang kompetitif, penguatan lembaga politik, serta penerapan desentralisasi pemerintahan. Sebaliknya, Filipina masih menghadapi berbagai tantangan demokrasi, seperti dominasi dinasti politik, praktik patronase, korupsi, dan lemahnya pelembagaan partai politik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi formal, tetapi juga oleh budaya politik dan kapasitas institusional yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam perspektif Huntington (1968), pembangunan politik sangat dipengaruhi oleh tingkat institusionalisasi politik. Institusi yang kuat mampu mengelola tuntutan masyarakat dan menjaga stabilitas politik di tengah perubahan sosial yang cepat. Sementara itu, North (1990) menjelaskan bahwa institusi formal dan informal berperan penting dalam membentuk perilaku politik serta menentukan efektivitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, analisis terhadap institusi politik menjadi penting untuk memahami perbedaan perkembangan demokrasi antara Indonesia dan Filipina.

Selain aspek politik, kondisi sosial ekonomi juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi dan pembangunan nasional. Menurut laporan UNDP (2023) dan World Bank (2024), Indonesia dan Filipina termasuk negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara. Namun, kedua negara masih menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan kualitas pelayanan publik yang belum merata. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat dan efektivitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah.

Budaya politik juga menjadi variabel penting dalam studi politik komparatif. Almond (1960) menekankan bahwa orientasi masyarakat terhadap sistem politik akan memengaruhi pola partisipasi politik dan hubungan antara negara dengan warga negara. Budaya politik Indonesia yang dipengaruhi nilai gotong royong, musyawarah, dan pluralisme memiliki karakteristik yang berbeda dengan budaya politik Filipina yang cenderung dipengaruhi oleh patronase, hubungan personal, dan pengaruh keluarga politik dalam proses politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sejarah politik, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem kepartaian, kebudayaan

masyarakat, dan kondisi ekonomi sosial Indonesia serta Filipina. Melalui pendekatan politik komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan politik dan kualitas demokrasi di kedua negara, sekaligus memperkaya kajian politik komparatif di kawasan Asia Tenggara.

## **METODE PENELITIAN**

### **Research Design**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif (comparative qualitative research) untuk menganalisis persamaan dan perbedaan perkembangan politik, sistem pemerintahan, sistem kepartaian, budaya masyarakat, serta kondisi ekonomi sosial Indonesia dan Filipina. Metode komparatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami variasi karakteristik politik dan institusional antarnegara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

### **Data Sources**

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber akademik dan dokumen resmi. Data penelitian berasal dari buku-buku politik komparatif, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan organisasi internasional, serta dokumen statistik yang relevan dengan perkembangan politik dan sosial ekonomi kedua negara.

Sumber utama penelitian meliputi karya Almond (1960), Almond dan Powell (1966), Huntington (1968), North (1990), Diamond (1999), Aspinall dan Mietzner (2019), Croissant dan Lorenz (2018), serta laporan Freedom House (2024), World Bank (2024), World Governance Indicators (2024), dan UNDP (2023).

### **Analytical Framework**

Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori politik komparatif Almond dan Powell (1966) yang menekankan hubungan antara struktur dan fungsi politik dalam suatu sistem politik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori pembangunan politik Huntington (1968) untuk menjelaskan proses institusionalisasi politik, teori budaya politik Almond (1960) untuk memahami karakteristik budaya politik masyarakat, serta teori institusionalisme North (1990) untuk menganalisis peran institusi formal dan informal dalam membentuk perilaku politik dan tata kelola pemerintahan.

### **Data Analysis Technique**

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan kondisi politik dan sosial ekonomi Indonesia serta Filipina. Kedua, data yang telah diperoleh diklasifikasikan berdasarkan enam indikator utama penelitian, yaitu sejarah politik, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem kepartaian, kebudayaan masyarakat, dan kondisi ekonomi sosial. Ketiga, data dianalisis secara deskriptif-

komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan politik di kedua negara. Keempat, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan teori-teori yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai dinamika politik dan institusional Indonesia dan Filipina.

### **Validity and Reliability**

Untuk meningkatkan validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur, jurnal akademik, dan laporan lembaga internasional. Teknik ini digunakan untuk memastikan konsistensi data serta meningkatkan tingkat akurasi dan kredibilitas hasil penelitian dalam menjelaskan perkembangan politik dan kondisi sosial ekonomi kedua negara.

### **Unit of Analysis**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara Indonesia dan Filipina. Perbandingan dilakukan berdasarkan enam aspek utama, yaitu sejarah politik, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem kepartaian, kebudayaan masyarakat, dan kondisi ekonomi sosial. Keenam aspek tersebut digunakan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan perkembangan politik serta kualitas demokrasi di kedua negara.

### **Literatur Review**

#### **Politik Komparatif**

Politik komparatif merupakan pendekatan dalam ilmu politik yang digunakan untuk memahami persamaan dan perbedaan sistem politik antarnegara melalui analisis terhadap institusi, proses politik, budaya politik, serta kondisi sosial ekonomi yang melingkupinya. Menurut Almond dan Powell (1966), tujuan utama politik komparatif adalah menjelaskan bagaimana struktur dan fungsi politik bekerja dalam berbagai sistem politik yang berbeda. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada lembaga formal seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga memperhatikan aktor politik, budaya politik, serta hubungan antara masyarakat dan negara.

Almond (1960) menjelaskan bahwa setiap sistem politik memiliki fungsi-fungsi penting seperti artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penyelesaian konflik. Efektivitas fungsi-fungsi tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan institusi politik yang ada dalam suatu negara. Oleh karena itu, studi politik komparatif menjadi alat penting untuk memahami variasi perkembangan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Filipina.

Dalam penelitian ini, pendekatan politik komparatif digunakan untuk membandingkan sejarah politik, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem kepartaian, budaya masyarakat, serta kondisi ekonomi sosial Indonesia dan Filipina guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di kedua negara.

## **Teori Pembangunan Politik**

Teori pembangunan politik yang dikemukakan Huntington (1968) menjelaskan bahwa stabilitas politik tidak hanya bergantung pada demokratisasi, tetapi juga pada tingkat institusionalisasi politik. Huntington mendefinisikan institusionalisasi sebagai proses ketika organisasi dan prosedur politik memperoleh stabilitas, nilai, dan legitimasi dalam masyarakat.

Menurut Huntington, negara yang mengalami modernisasi dan mobilisasi politik yang cepat tanpa diimbangi oleh penguatan institusi politik cenderung menghadapi ketidakstabilan politik. Sebaliknya, negara dengan institusi yang kuat akan lebih mampu mengelola konflik, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menjaga stabilitas pemerintahan.

Teori ini relevan dalam membandingkan Indonesia dan Filipina karena kedua negara mengalami proses demokratisasi yang berbeda. Indonesia menunjukkan perkembangan institusi politik yang relatif lebih stabil setelah Reformasi 1998, sementara Filipina masih menghadapi tantangan berupa dominasi elite politik, patronase, dan dinasti politik yang memengaruhi kualitas demokrasi.

## **Teori Institusionalisme**

Institusionalisme merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya institusi dalam membentuk perilaku politik dan ekonomi. North (1990) mendefinisikan institusi sebagai aturan formal maupun informal yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat. Institusi formal mencakup konstitusi, undang-undang, dan organisasi pemerintahan, sedangkan institusi informal meliputi norma, tradisi, dan budaya politik.

Menurut North (1990), kualitas institusi menentukan efektivitas pemerintahan, stabilitas politik, dan keberhasilan pembangunan ekonomi. Negara dengan institusi yang kuat cenderung memiliki tingkat kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan yang lebih baik dibandingkan negara dengan institusi yang lemah.

Dalam konteks Indonesia dan Filipina, teori institusionalisme membantu menjelaskan bagaimana perbedaan kapasitas institusi politik memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan, sistem kepartaian, dan proses demokrasi yang berkembang di masing-masing negara.

## **Demokratisasi dan Konsolidasi Demokrasi**

Demokratisasi merupakan proses transisi dari sistem politik yang otoriter menuju sistem yang lebih demokratis. Diamond (1999) menjelaskan bahwa demokrasi dapat dianggap terkonsolidasi apabila lembaga-lembaga demokrasi telah diterima sebagai satu-satunya mekanisme yang sah dalam mengelola kekuasaan politik.

Konsolidasi demokrasi ditandai oleh penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keberadaan institusi politik yang efektif. Dalam konteks Indonesia, Aspinall (2010) dan Aspinall dan Mietzner

(2019) menunjukkan bahwa Reformasi 1998 telah menghasilkan kemajuan signifikan dalam demokratisasi melalui pemilu yang kompetitif, desentralisasi, dan kebebasan sipil yang lebih luas. Namun, tantangan seperti oligarki politik, korupsi, dan politik uang masih menjadi hambatan dalam konsolidasi demokrasi.

Di Filipina, demokratisasi pasca-Marcos juga membawa perubahan politik yang signifikan, tetapi masih dihadapkan pada persoalan dinasti politik, patronase, dan lemahnya institusionalisasi partai politik. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas demokrasi Filipina berkembang secara lebih lambat dibandingkan beberapa negara demokrasi lainnya di Asia Tenggara.

### **Budaya Politik**

Budaya politik merupakan pola orientasi masyarakat terhadap sistem politik dan proses pemerintahan. Almond (1960) menjelaskan bahwa budaya politik memengaruhi cara masyarakat memahami, menilai, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Budaya politik juga menentukan hubungan antara warga negara dengan institusi pemerintahan.

Anderson (1990) menjelaskan bahwa budaya politik Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan semangat kolektivitas yang kemudian dipadukan dengan konsep negara modern. Nilai-nilai tersebut berkontribusi terhadap pembentukan identitas nasional dan pola partisipasi politik masyarakat Indonesia.

Di Filipina, budaya politik cenderung dipengaruhi oleh hubungan patron-klien, ikatan kekeluargaan, serta dominasi elite lokal dalam proses politik. Karakteristik tersebut menyebabkan hubungan personal sering kali lebih dominan dibandingkan orientasi ideologis dalam menentukan pilihan politik masyarakat.

Perbedaan budaya politik antara Indonesia dan Filipina menjadi faktor penting yang memengaruhi perkembangan sistem kepartaian, kualitas demokrasi, dan efektivitas pemerintahan di kedua negara.

### **Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perkembangan politik suatu negara dipengaruhi oleh interaksi antara faktor sejarah, institusi politik, budaya politik, dan kondisi sosial ekonomi. Berdasarkan teori Almond dan Powell (1966), Huntington (1968), dan North (1990), penelitian ini membandingkan Indonesia dan Filipina melalui enam indikator utama, yaitu:

1. Sejarah politik.
2. Sistem politik.
3. Sistem pemerintahan.
4. Sistem kepartaian.
5. Kebudayaan masyarakat.
6. Kondisi ekonomi sosial.

Melalui perbandingan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana perbedaan institusionalisasi politik dan budaya politik memengaruhi kualitas demokrasi, efektivitas pemerintahan, dan pembangunan nasional di Indonesia dan Filipina. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat konsolidasi demokrasi di kedua negara.

### **State of the Art dan Research Gap**

Kajian mengenai perkembangan politik dan demokrasi di Asia Tenggara telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan menggunakan berbagai pendekatan politik komparatif. Almond dan Powell (1966) menjelaskan bahwa studi politik komparatif bertujuan untuk memahami persamaan dan perbedaan sistem politik melalui analisis struktur dan fungsi politik yang berkembang dalam suatu negara. Sementara itu, Huntington (1968) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan politik tidak hanya ditentukan oleh demokratisasi, tetapi juga oleh tingkat institusionalisasi politik yang mampu menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, penelitian Aspinall (2010) serta Aspinall dan Mietzner (2019) berfokus pada perkembangan demokrasi pasca-Reformasi dengan menyoroti konsolidasi demokrasi, desentralisasi, serta tantangan oligarki politik dalam sistem pemerintahan. Di sisi lain, Croissant dan Lorenz (2018) mengkaji perkembangan politik negara-negara Asia Tenggara dengan menyoroti variasi kualitas demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan kapasitas institusi politik. Penelitian lain yang membandingkan Indonesia dan Filipina dilakukan oleh Arawi (2022) mengenai representasi perempuan di parlemen, Irsalina dan Atthahara (2022) mengenai partisipasi perempuan dalam partai politik, Leksono dan Andriyanti (2023) mengenai sistem administrasi negara, serta Utami et al. (2025) mengenai perbandingan sistem pendidikan kedua negara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dan Filipina memiliki karakteristik politik yang relatif serupa sebagai negara demokrasi presidensial, tetapi memiliki perbedaan dalam kualitas institusi, partisipasi politik, dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek-aspek tertentu secara parsial, seperti demokratisasi, representasi perempuan, administrasi negara, atau sistem pendidikan. Penelitian yang mengkaji secara komprehensif hubungan antara sejarah politik, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem kepartaian, budaya masyarakat, dan kondisi ekonomi sosial Indonesia dan Filipina masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya belum mengintegrasikan teori politik komparatif Almond dan Powell (1966), teori pembangunan politik Huntington (1968), teori budaya politik Almond (1960), dan teori institusionalisme North (1990) dalam satu kerangka analisis yang utuh. Akibatnya, keterkaitan antara perkembangan institusi politik, budaya politik, dan kondisi sosial ekonomi dalam memengaruhi kualitas demokrasi belum dijelaskan secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengisi kesenjangan (research gap) dengan menyajikan analisis komparatif yang lebih komprehensif mengenai Indonesia dan Filipina

melalui enam indikator utama, yaitu sejarah politik, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem kepartaian, kebudayaan masyarakat, dan kondisi ekonomi sosial. Penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif politik komparatif, pembangunan politik, budaya politik, dan institusionalisme untuk menjelaskan bagaimana perbedaan institusi politik, budaya masyarakat, dan kondisi sosial ekonomi memengaruhi kualitas demokrasi serta efektivitas tata kelola pemerintahan di kedua negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian politik komparatif di Asia Tenggara, khususnya mengenai dinamika politik dan pembangunan demokrasi di Indonesia dan Filipina.

## **Result and Discussion**

### **Historical Background of Indonesia and the Philippines**

Indonesia dan Filipina memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, tetapi sama-sama mengalami pengalaman kolonialisme yang memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan sistem politik modern mereka. Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda selama lebih dari tiga abad sebelum memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai perubahan sistem politik, mulai dari Demokrasi Liberal (1945–1959), Demokrasi Terpimpin (1959–1965), rezim Orde Baru (1966–1998), hingga Era Reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan dinamika pembangunan politik yang dipengaruhi oleh kondisi domestik maupun lingkungan internasional.

Pada masa Demokrasi Liberal, Indonesia menerapkan sistem parlementer yang ditandai dengan tingginya kompetisi politik dan sering bergantinya kabinet. Namun, kondisi tersebut dianggap tidak mampu menciptakan stabilitas politik sehingga Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin yang memperkuat dominasi eksekutif. Setelah peristiwa G30S tahun 1965, kekuasaan beralih kepada Soeharto yang membangun rezim Orde Baru dengan karakteristik sentralisasi kekuasaan dan stabilitas politik sebagai prioritas utama. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting yang mendorong demokratisasi melalui pemilu yang lebih kompetitif, desentralisasi pemerintahan, serta penguatan lembaga-lembaga demokrasi.

Sementara itu, Filipina mengalami kolonialisme Spanyol selama lebih dari 300 tahun sejak abad ke-16 sebelum berpindah ke bawah kekuasaan Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika tahun 1898. Pengaruh kolonial Amerika memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan institusi politik Filipina, terutama sistem demokrasi liberal dan pemerintahan presidensial. Filipina memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1946 dan mulai membangun sistem politik nasional yang mengadopsi banyak elemen dari sistem politik Amerika Serikat.

Perkembangan politik Filipina pascakemerdekaan ditandai oleh dominasi elite politik dan keluarga-keluarga berpengaruh dalam proses pemerintahan. Pada tahun 1972, Presiden Ferdinand Marcos memberlakukan darurat militer yang mengubah Filipina menjadi rezim yang lebih otoriter. Pemerintahan Marcos berlangsung hingga tahun 1986 ketika Revolusi

People Power berhasil menggulingkan rezim tersebut dan mengembalikan sistem demokrasi. Sejak saat itu, Filipina menjalankan sistem demokrasi konstitusional dengan pemilu yang relatif kompetitif, meskipun masih menghadapi tantangan berupa korupsi, patronase politik, dan dominasi dinasti politik.

Dalam perspektif pembangunan politik Huntington (1968), sejarah politik Indonesia dan Filipina menunjukkan bahwa stabilitas politik sangat dipengaruhi oleh tingkat institusionalisasi politik. Indonesia pasca-Reformasi menunjukkan upaya yang lebih sistematis dalam memperkuat institusi politik melalui reformasi konstitusi, desentralisasi, dan penguatan mekanisme demokrasi. Sebaliknya, Filipina masih menghadapi pengaruh kuat institusi informal berupa patronase dan dinasti politik yang membatasi efektivitas demokrasi. Oleh karena itu, meskipun kedua negara sama-sama mengalami transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi, hasil perkembangan politik yang dicapai menunjukkan karakteristik yang berbeda sesuai dengan konteks sejarah masing-masing negara.

### **Political System in Indonesia and the Philippines**

Indonesia dan Filipina sama-sama menerapkan sistem politik demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai sumber utama kedaulatan negara. Meskipun demikian, perkembangan dan praktik sistem politik di kedua negara menunjukkan karakteristik yang berbeda akibat pengaruh sejarah, budaya politik, serta tingkat pelembagaan institusi politik yang tidak sama. Dalam perspektif Almond dan Powell (1966), sistem politik merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai struktur yang menjalankan fungsi politik untuk mempertahankan stabilitas dan mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, efektivitas sistem politik dapat dilihat dari kemampuan institusi dalam mengelola tuntutan masyarakat serta menghasilkan kebijakan yang responsif dan akuntabel.

Indonesia menganut sistem politik demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setelah Reformasi 1998, sistem politik Indonesia mengalami perubahan signifikan yang ditandai dengan penguatan demokrasi, kebebasan pers, peningkatan partisipasi politik masyarakat, serta penerapan desentralisasi pemerintahan. Reformasi konstitusi juga memperkuat mekanisme checks and balances melalui pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Perkembangan demokrasi Indonesia menunjukkan peningkatan kualitas institusional dibandingkan periode sebelumnya. Pemilu dilaksanakan secara rutin dan kompetitif dengan melibatkan berbagai partai politik serta kelompok masyarakat sipil. Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga integritas proses demokrasi. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti politik uang, korupsi, polarisasi politik, dan pengaruh oligarki dalam proses pengambilan kebijakan.

Sementara itu, Filipina juga menerapkan sistem politik demokrasi konstitusional yang banyak dipengaruhi oleh model demokrasi liberal Amerika Serikat. Sistem politik Filipina menjamin hak-hak politik warga negara, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta kompetisi politik melalui pemilu yang diselenggarakan secara berkala. Konstitusi Filipina menegaskan prinsip kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui mekanisme pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan.

Meskipun memiliki kerangka demokrasi yang relatif kuat, praktik politik di Filipina sering kali dipengaruhi oleh dominasi elite politik dan keluarga-keluarga berpengaruh. Dinasti politik masih memainkan peran penting dalam pemilihan umum maupun proses pembuatan kebijakan. Hubungan patron-klien yang berkembang dalam masyarakat menyebabkan kompetisi politik sering kali lebih ditentukan oleh jaringan kekuasaan dan sumber daya ekonomi dibandingkan program atau ideologi politik. Kondisi ini mengakibatkan kualitas representasi politik dan akuntabilitas pemerintahan belum berkembang secara optimal.

Berdasarkan teori sistem politik Easton (1965), sistem politik berfungsi sebagai mekanisme yang mengubah tuntutan dan dukungan masyarakat menjadi kebijakan publik. Dalam konteks ini, Indonesia menunjukkan kapasitas yang relatif lebih baik dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui penguatan institusi demokrasi dan partisipasi politik yang semakin luas. Sebaliknya, Filipina masih menghadapi tantangan dalam mengurangi dominasi elite politik yang dapat menghambat proses demokratisasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Secara keseluruhan, Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan sebagai negara demokrasi konstitusional yang memberikan ruang bagi partisipasi politik masyarakat. Namun, Indonesia menunjukkan tingkat institusionalisasi politik yang relatif lebih kuat pasca-Reformasi, sedangkan Filipina masih menghadapi pengaruh signifikan dari patronase politik dan dinasti kekuasaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem politik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi formal, tetapi juga oleh budaya politik dan kapasitas institusi dalam menjalankan fungsi-fungsi politik secara efektif.

### **Government System in Indonesia and the Philippines**

Indonesia dan Filipina sama-sama menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem presidensial dipilih untuk menciptakan stabilitas politik melalui pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun memiliki bentuk pemerintahan yang serupa, terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan dan efektivitas sistem pemerintahan di kedua negara yang dipengaruhi oleh kondisi institusional dan budaya politik masing-masing.

Di Indonesia, sistem pemerintahan presidensial diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Presiden memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif

yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan, menyusun kebijakan publik, serta memimpin kabinet. Sistem presidensial Indonesia juga didukung oleh mekanisme checks and balances yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan berbagai lembaga negara independen.

Pasca-Reformasi 1998, Indonesia melakukan berbagai perubahan konstitusional yang bertujuan memperkuat sistem pemerintahan demokratis. Pemilihan presiden secara langsung, pembatasan masa jabatan presiden, penguatan fungsi pengawasan DPR, dan peningkatan independensi lembaga yudikatif menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Menurut MacIntyre (2003), desain kelembagaan pasca-Reformasi berhasil menciptakan distribusi kekuasaan yang lebih seimbang dibandingkan masa Orde Baru yang cenderung terpusat pada eksekutif.

Sementara itu, Filipina juga menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang banyak dipengaruhi oleh sistem politik Amerika Serikat. Presiden Filipina dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan enam tahun dan tidak dapat mencalonkan diri kembali setelah masa jabatannya berakhir. Ketentuan tersebut dirancang untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dan memperkuat prinsip pergantian kepemimpinan secara demokratis. Presiden memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan, mengangkat pejabat tinggi negara, serta mengendalikan kebijakan nasional.

Meskipun secara formal memiliki mekanisme pemisahan kekuasaan yang kuat, efektivitas sistem pemerintahan Filipina sering kali dipengaruhi oleh dominasi elite politik dan dinasti keluarga yang memiliki pengaruh besar dalam lembaga legislatif maupun pemerintahan daerah. Hubungan antara eksekutif dan legislatif sering dibentuk oleh kepentingan politik elite, sehingga proses pengambilan kebijakan terkadang lebih berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan publik secara luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh desain konstitusional, tetapi juga oleh praktik politik yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam perspektif institusionalisme North (1990), efektivitas pemerintahan dipengaruhi oleh interaksi antara institusi formal dan institusi informal. Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam memperkuat institusi formal melalui reformasi birokrasi, penguatan sistem hukum, dan peningkatan akuntabilitas pemerintahan. Sebaliknya, Filipina masih menghadapi tantangan berupa pengaruh kuat institusi informal seperti patronase politik, klientelisme, dan dinasti politik yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan pemerintahan (Irsalina & Atthahara, 2022).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan dalam penerapan sistem presidensial dan prinsip demokrasi konstitusional. Namun, Indonesia menunjukkan tingkat konsolidasi kelembagaan yang relatif lebih baik pasca-Reformasi, sementara Filipina masih menghadapi tantangan dalam mengurangi dominasi elite politik dan memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kualitas sistem pemerintahan tidak hanya bergantung

pada bentuk konstitusional yang dianut, tetapi juga pada kapasitas institusi politik dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif dan akuntabel.

### **Party System in Indonesia and the Philippines**

Sistem kepartaian merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi karena berfungsi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, rekrutmen politik, pendidikan politik, serta penghubung antara pemerintah dan warga negara. Menurut Almond dan Powell (1966), partai politik memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem politik dengan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, tingkat pelembagaan partai politik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara.

Indonesia menerapkan sistem multipartai yang berkembang secara signifikan setelah Reformasi 1998. Berakhirnya rezim Orde Baru membuka ruang yang lebih luas bagi pembentukan partai politik dan kompetisi politik yang demokratis. Saat ini, berbagai partai politik berpartisipasi dalam pemilu nasional maupun daerah dengan membawa ideologi, program, dan basis dukungan yang beragam. Sistem multipartai di Indonesia memungkinkan representasi berbagai kelompok sosial, agama, dan kepentingan politik dalam proses pemerintahan.

Meskipun demikian, sistem kepartaian Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Menurut Mietzner (2013), partai politik di Indonesia masih dipengaruhi oleh praktik politik uang, personalisasi kepemimpinan, dan dominasi elite ekonomi dalam pendanaan politik. Selain itu, ideologi partai sering kali tidak menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan pemilih, sehingga kompetisi politik lebih banyak dipengaruhi oleh figur kandidat dan strategi elektoral. Namun, dibandingkan banyak negara berkembang lainnya, partai-partai politik di Indonesia menunjukkan tingkat pelembagaan yang relatif lebih baik karena memiliki struktur organisasi yang jelas dan keberlanjutan dalam mengikuti proses demokrasi.

Di Filipina, sistem multipartai juga diterapkan sebagai bagian dari demokrasi konstitusional. Akan tetapi, karakteristik sistem kepartaian Filipina berbeda dengan Indonesia. Partai politik di Filipina cenderung bersifat personalistik dan berorientasi pada figur politik tertentu dibandingkan pada ideologi atau platform kebijakan yang kuat. Banyak partai dibentuk untuk mendukung kepentingan tokoh politik tertentu, sehingga loyalitas anggota partai relatif rendah dan perpindahan partai oleh politisi sering terjadi.

Dominasi dinasti politik menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi perkembangan sistem kepartaian di Filipina. Keluarga-keluarga politik yang memiliki sumber daya ekonomi dan jaringan kekuasaan yang luas sering kali menguasai partai politik maupun proses pemilihan umum. Akibatnya, kompetisi politik lebih banyak berlangsung antar elite dibandingkan antar program politik. Kondisi ini menyebabkan partai politik kurang efektif dalam menjalankan fungsi representasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.

Dalam perspektif Huntington (1968), tingkat institusionalisasi partai politik dapat dilihat dari stabilitas organisasi, legitimasi, dan kemampuan partai dalam menjalankan fungsinya secara konsisten. Berdasarkan indikator tersebut, sistem kepartaian Indonesia menunjukkan tingkat institusionalisasi yang lebih tinggi dibandingkan Filipina. Partai-partai politik di Indonesia memiliki struktur organisasi yang lebih permanen, mekanisme kaderisasi yang lebih jelas, serta kemampuan yang lebih baik dalam mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan politik.

Sebaliknya, sistem kepartaian Filipina masih menghadapi tantangan berupa lemahnya identitas partai, tingginya tingkat personalisasi politik, dan dominasi keluarga politik dalam proses elektoral. Kondisi tersebut menyebabkan pelebagaan partai politik berjalan lebih lambat dan berdampak pada kualitas representasi politik. Menurut Levitsky dan Way (2010), lemahnya institusionalisasi partai dapat menghambat konsolidasi demokrasi karena partai tidak mampu berfungsi sebagai saluran utama bagi partisipasi dan akuntabilitas politik.

Secara keseluruhan, Indonesia dan Filipina sama-sama menerapkan sistem multipartai sebagai bagian dari sistem demokrasi. Namun, Indonesia menunjukkan tingkat pelebagaan partai yang relatif lebih kuat dibandingkan Filipina. Sementara partai politik di Indonesia berfungsi sebagai institusi politik yang relatif stabil, partai politik di Filipina masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan elite dan dinasti politik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sistem kepartaian sangat dipengaruhi oleh tingkat institusionalisasi politik dan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat.

### **Socio-Cultural Characteristics of Indonesia and the Philippines**

Kebudayaan masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan sistem politik, pola partisipasi politik, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam perspektif Almond (1960), budaya politik mencerminkan orientasi, nilai, dan sikap masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku. Oleh karena itu, perbedaan budaya masyarakat dapat menghasilkan karakteristik politik yang berbeda meskipun negara-negara tersebut memiliki sistem pemerintahan yang serupa. Indonesia dan Filipina sama-sama merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman sosial yang tinggi, namun keduanya menunjukkan karakteristik budaya politik yang berbeda akibat pengaruh sejarah, agama, dan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat (Syarif & Bahri, 2025).

Indonesia dikenal sebagai negara multikultural dengan lebih dari seribu kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, serta berbagai agama dan kepercayaan yang hidup berdampingan. Keberagaman tersebut kemudian dipersatukan melalui identitas nasional yang berlandaskan Pancasila dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan solidaritas sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Anderson (1990) menjelaskan bahwa budaya politik Indonesia berkembang melalui perpaduan antara tradisi lokal, nilai-nilai komunal, dan proses pembentukan negara modern pascakemerdekaan (Leksono & Andriyanti, 2023).

Dalam kehidupan politik, budaya musyawarah dan konsensus sering menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Meskipun

praktik demokrasi modern telah berkembang, nilai-nilai kolektivitas masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku politik masyarakat. Selain itu, keberagaman etnis dan agama mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang menekankan persatuan nasional guna menjaga stabilitas politik dan integrasi sosial (Utami et al., 2025).

Berbeda dengan Indonesia, budaya masyarakat Filipina sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial Spanyol dan Amerika Serikat. Pengaruh tersebut terlihat dalam dominasi agama Katolik yang dianut oleh mayoritas penduduk Filipina serta berkembangnya nilai-nilai individualisme yang lebih kuat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hubungan kekeluargaan memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Filipina. Loyalitas terhadap keluarga sering kali menjadi faktor utama dalam hubungan sosial maupun politik.

Karakteristik budaya politik Filipina juga ditandai oleh kuatnya hubungan patron-klien antara elite politik dan masyarakat. Dalam sistem ini, dukungan politik sering diberikan berdasarkan hubungan personal, bantuan ekonomi, atau kedekatan sosial dibandingkan pertimbangan ideologis. Akibatnya, keluarga-keluarga politik yang memiliki sumber daya ekonomi dan pengaruh sosial yang besar dapat mempertahankan dominasinya dalam berbagai tingkatan pemerintahan. Fenomena ini turut memperkuat keberadaan dinasti politik yang menjadi salah satu ciri utama politik Filipina.

Dalam perspektif budaya politik Almond (1960), masyarakat Indonesia cenderung menunjukkan karakter budaya politik partisipatif yang berkembang melalui demokratisasi dan peningkatan pendidikan politik pasca-Reformasi. Sementara itu, masyarakat Filipina masih memperlihatkan kombinasi budaya politik partisipatif dan parokial, di mana pengaruh elite lokal dan hubungan patronase tetap memainkan peran penting dalam menentukan orientasi politik masyarakat.

Selain dalam bidang politik, perbedaan budaya masyarakat juga tercermin dalam kehidupan sosial. Indonesia memiliki tingkat keberagaman budaya yang lebih tinggi sehingga pengelolaan pluralisme menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan nasional. Sebaliknya, Filipina memiliki homogenitas agama yang relatif lebih kuat, tetapi menghadapi tantangan berupa kesenjangan sosial dan konflik identitas di beberapa wilayah tertentu, terutama di wilayah selatan yang memiliki populasi Muslim yang signifikan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya masyarakat Indonesia dan Filipina memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan sistem politik dan kualitas demokrasi di masing-masing negara. Budaya gotong royong, musyawarah, dan pluralisme yang berkembang di Indonesia cenderung mendukung proses integrasi nasional dan penguatan institusi demokrasi. Sebaliknya, budaya patronase dan kuatnya hubungan kekeluargaan di Filipina sering kali memperkuat dominasi elite politik dan menghambat proses pelembagaan politik. Oleh karena itu, budaya masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang menjelaskan perbedaan perkembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan antara Indonesia dan Filipina.

### **Socio-Economic Conditions of Indonesia and the Philippines**

Kondisi ekonomi dan sosial merupakan faktor penting yang memengaruhi stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, serta kualitas demokrasi suatu negara. Menurut Huntington (1968), pembangunan ekonomi yang tidak diimbangi oleh pembangunan politik dan institusional dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan politik. Sementara itu, North (1990) menekankan bahwa kualitas institusi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia dan Filipina merupakan dua negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara dan salah satu ekonomi terbesar di kawasan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh sektor industri manufaktur, perdagangan, jasa, pertanian, dan sumber daya alam. Sejak Reformasi 1998, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan pembangunan, reformasi birokrasi, serta peningkatan investasi domestik dan asing. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil turut mendorong penurunan angka kemiskinan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan dalam dua dekade terakhir telah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia juga mengembangkan berbagai program perlindungan sosial untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan pendapatan, pengangguran, kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta tingginya tingkat pekerjaan di sektor informal.

Di sisi lain, Filipina menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama yang didukung oleh sektor jasa, industri teknologi informasi, dan remitansi pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Remitansi dari pekerja migran menjadi salah satu sumber devisa terbesar yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, sektor Business Process Outsourcing (BPO) berkembang pesat dan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Filipina (Arawi, 2022).

Meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, Filipina masih menghadapi berbagai persoalan sosial yang cukup kompleks. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih relatif tinggi dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Selain itu, ketergantungan yang besar terhadap remitansi pekerja migran menunjukkan bahwa sebagian pertumbuhan ekonomi Filipina masih bergantung pada faktor eksternal.

Dari sisi pembangunan manusia, Indonesia dan Filipina sama-sama mengalami peningkatan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Tingkat melek huruf yang tinggi, meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah, serta perbaikan layanan kesehatan menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan sosial. Namun, kedua negara masih

menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.

Berdasarkan perspektif pembangunan politik dan institusionalisme, kondisi sosial ekonomi yang baik dapat mendukung stabilitas politik dan konsolidasi demokrasi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memungkinkan pemerintah meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat legitimasi politik. Sebaliknya, ketimpangan sosial dan kemiskinan yang tinggi dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat serta menghambat efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, kualitas institusi politik dan tata kelola pemerintahan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial.

Secara komparatif, Indonesia memiliki keunggulan dalam ukuran ekonomi, jumlah penduduk, serta pembangunan infrastruktur yang lebih luas. Sementara itu, Filipina menunjukkan keunggulan dalam sektor jasa dan remitansi tenaga kerja migran yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kedua negara masih menghadapi tantangan yang relatif serupa, yaitu ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia maupun Filipina sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memperkuat institusi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Conclusion**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Filipina memiliki sejumlah persamaan sebagai negara berkembang di Asia Tenggara yang pernah mengalami kolonialisme, menerapkan sistem demokrasi konstitusional, serta menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Pengalaman sejarah kolonial dan transisi menuju demokrasi menjadi faktor penting yang membentuk perkembangan politik, institusi pemerintahan, dan kehidupan sosial ekonomi di kedua negara. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam tingkat institusionalisasi politik, budaya politik, sistem kepartaian, dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Dari aspek sejarah politik, Indonesia dan Filipina sama-sama mengalami periode pemerintahan otoriter sebelum memasuki era demokrasi. Namun, Indonesia menunjukkan proses reformasi institusional yang lebih luas pasca-Reformasi 1998 dibandingkan Filipina pasca-Revolusi People Power 1986. Perbedaan tersebut memengaruhi perkembangan sistem politik dan kualitas demokrasi yang berkembang di kedua negara.

Dalam aspek sistem politik dan sistem pemerintahan, kedua negara menerapkan demokrasi presidensial dengan mekanisme pemilihan umum yang kompetitif. Akan tetapi, Indonesia menunjukkan tingkat konsolidasi demokrasi yang relatif lebih kuat melalui penguatan lembaga politik, desentralisasi pemerintahan, dan peningkatan mekanisme checks and balances. Sebaliknya, Filipina masih menghadapi tantangan berupa dominasi elite politik, patronase, dan dinasti politik yang memengaruhi efektivitas pemerintahan dan kualitas representasi politik.

Pada aspek sistem kepartaian, Indonesia memiliki tingkat pelembagaan partai politik yang lebih baik dibandingkan Filipina. Partai-partai politik di Indonesia relatif lebih stabil dan memiliki struktur organisasi yang lebih jelas, sementara partai politik di Filipina cenderung bersifat personalistik dan dipengaruhi oleh kepentingan keluarga politik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas sistem kepartaian sangat dipengaruhi oleh tingkat institusionalisasi politik yang berkembang dalam suatu negara.

Dari perspektif kebudayaan masyarakat, Indonesia memiliki budaya politik yang dipengaruhi oleh nilai gotong royong, musyawarah, dan pluralisme, sedangkan Filipina lebih dipengaruhi oleh hubungan patron-klien, loyalitas keluarga, dan pengaruh agama Katolik. Perbedaan budaya politik tersebut berkontribusi terhadap perbedaan pola partisipasi politik, hubungan antara masyarakat dan negara, serta proses pelembagaan demokrasi di kedua negara.

Dalam aspek kondisi ekonomi sosial, Indonesia dan Filipina sama-sama mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik serta peningkatan pembangunan manusia dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia memiliki keunggulan dalam ukuran ekonomi, jumlah penduduk, dan pembangunan infrastruktur, sedangkan Filipina menunjukkan perkembangan yang kuat pada sektor jasa dan remitansi pekerja migran. Meskipun demikian, kedua negara masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan perspektif politik komparatif, pembangunan politik yang berhasil tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi formal, tetapi juga oleh budaya politik, kapasitas pemerintahan, dan kondisi sosial ekonomi yang mendukung. Oleh karena itu, penguatan institusi politik, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi faktor penting dalam mendukung konsolidasi demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia maupun Filipina. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki karakteristik yang relatif serupa sebagai demokrasi berkembang di Asia Tenggara, perbedaan dalam institusionalisasi politik dan budaya politik menghasilkan dinamika demokrasi yang berbeda dalam praktiknya.

### **Acknowledgments**

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, atas bimbingan, arahan, serta dukungan akademik yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini.

Penulis turut menyampaikan apresiasi kepada para akademisi, peneliti, dan lembaga yang telah menghasilkan berbagai buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi terkait Indonesia, Filipina, politik komparatif, demokratisasi, tata kelola pemerintahan, serta kondisi sosial ekonomi yang menjadi sumber referensi penting dalam penelitian ini.

Kontribusi mereka sangat membantu dalam memperkaya analisis dan memperkuat landasan teoritis penelitian.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pihak yang telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian politik komparatif, khususnya dalam memahami dinamika politik, sistem pemerintahan, budaya politik, dan kondisi sosial ekonomi Indonesia dan Filipina.

## **References**

- Almond, G. A. (1960). *The politics of the developing areas*. Princeton University Press.
- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). *Comparative politics: A developmental approach*. Little, Brown and Company.
- Anderson, B. R. O. G. (1990). *Language and power: Exploring political cultures in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E. (2010). The irony of success. *Journal of Democracy*, 21(2), 20–34. <https://doi.org/10.1353/jod.0.0167>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *Democratic decline in Indonesia: Problems of democratic consolidation*. Palgrave Macmillan.
- Büntje, M., & Ufen, A. (Eds.). (2009). *Democratization in post-Suharto Indonesia*. Routledge.
- Case, W. (2015). *Contemporary authoritarianism in Southeast Asia: Structures, institutions and agency*. Routledge.
- Croissant, A., & Lorenz, P. (2018). *Comparative politics of Southeast Asia*. Springer.
- Diamond, L. (1999). *Developing democracy: Toward consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. John Wiley & Sons.
- Fforde, A., & De Vylder, S. (1996). *From plan to market: The economic transition in Vietnam*. Westview Press.
- Freedom House. (2024). *Freedom in the world 2024*. Freedom House.
- Gainsborough, M. (2010). *Vietnam: Rethinking the state*. Zed Books.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.
- Huntington, S. P. (1968). *Political order in changing societies*. Yale University Press.
- Kingsbury, D. (2003). *Power politics and the Indonesian military*. RoutledgeCurzon.

- Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). *Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War*. Cambridge University Press.
- MacIntyre, A. (2003). *The power of institutions: Political architecture and governance*. Cornell University Press.
- Malesky, E. (2014). Understanding the Vietnamese political system. In J. London (Ed.), *Politics in contemporary Vietnam* (pp. 25–42). Palgrave Macmillan.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Pye, L. W. (1966). *Aspects of political development*. Little, Brown and Company.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon.
- The World Bank. (2024). *World development indicators*. World Bank Publications.
- United Nations Development Programme. (2023). *Human development report 2023/2024*. UNDP.
- World Economic Forum. (2024). *Global competitiveness report*. World Economic Forum.
- World Governance Indicators. (2024). *Worldwide governance indicators*. World Bank.
- Zakaria, F. (2003). *The future of freedom: Illiberal democracy at home and abroad*. W. W. Norton & Company.
- Arawi, F. A. (2022). Perbandingan representasi perempuan di parlemen Indonesia dan Filipina. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 74-85.
- Syarif, N. H., & Bahri, B. (2025). Perbandingan Kurikulum Sejarah Indonesia dengan Negara Negara Asia Tenggara. *ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies*, 2(1), 39-50.
- Leksono, T. M., & Andriyanti, T. (2023). Perbandingan sistem administrasi negara Indonesia dengan Filipina. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 42-51.
- Utami, R. E., Mufidha, T. A., April, N. D. R., Meilani, N., & Lukitoaji, B. D. (2025). ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENDIDIKAN DALAM LINGKUP KURIKULUM ANTAR NEGARA BERKEMBANG: INDONESIA DAN FILIPINA. *Sosiola Pedagogi: Jurnal Inovasi Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 1(1).
- Irsalina, N., & Atthahara, H. (2022). PERKEMBANGAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN FILIPINA). *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 15(1), 19-50.